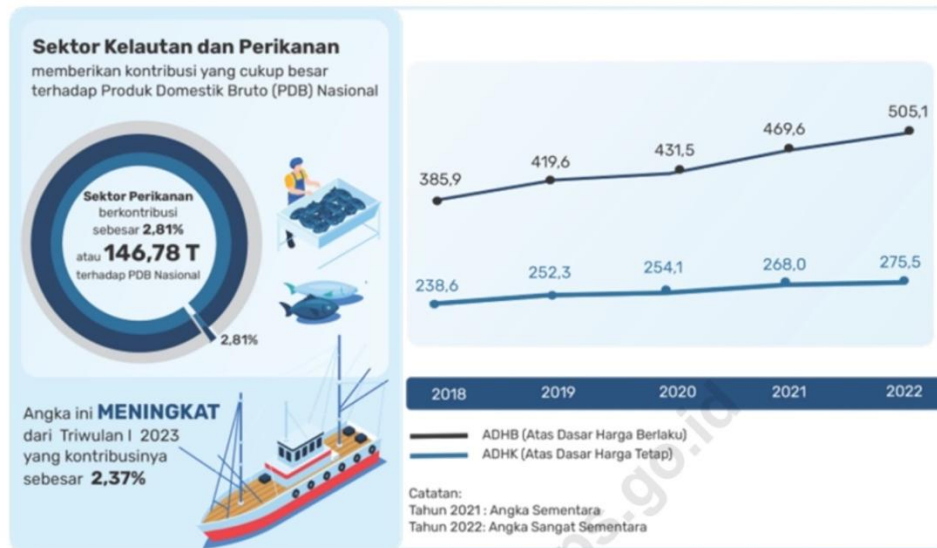


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis Indonesia terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, sehingga menyebabkan sebagian besar ikan dari kedua samudera tersebut dapat ditemukan di perairan Indonesia (Marjusni & Idris, 2023). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, dengan sektor perikanan yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, terutama di wilayah pesisir. (Aryanti et al., 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik, 2023, perikanan menyumbang 505,06 triliun rupiah pada tahun 2022 atau sebesar 2,58 persen terhadap PDB Nasional (Aryanti et al., 2023).



**Gambar 1. 1 Perkembangan PDB Perikanan ADHB dan ADHK
(Triliun Rupiah) 2018-2022**

Sumber: Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023

Pada gambar di atas terlihat bahwa PDB perikanan terus meningkat baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Pada tahun 2022, PDB Perikanan ADHK mencapai Rp275,5 triliun, meningkat sebesar 15,44% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp238,6 triliun. Sementara itu, PDB Perikanan ADHB meningkat sebesar 30,88% dari Rp385,9 triliun pada tahun 2018, menjadi Rp505,1 triliun pada tahun 2022 (Aryanti et al., 2023).

Sektor perikanan merupakan salah satu penyerap tenaga kerja utama di wilayah pesisir, dengan banyak masyarakat yang bergantung pada kegiatan perikanan dan pemrosesan hasil laut. Data kementerian Kelautan dan Perikanan (2022) mencatat sekitar 3,03 juta nelayan perikanan tangkap, dimana 2,4 juta diantaranya adalah nelayan laut (Aryanti et al., 2023). Kontribusi sektor ini tidak hanya penting bagi mata pencaharian masyarakat pesisir, tetapi juga berperan dalam mendukung ekonomi lokal dan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Pada lampiran 1 Tabel 1.1 diketahui bahwa Jawa Timur memiliki luas perairan 54.718 km² dan garis pantai sepanjang 3.498,12 km, menjadikannya provinsi dengan jumlah nelayan perikanan tangkap terbanyak, dibuktikan pada lampiran 1 Tabel 1.1. Kabupaten Lamongan berkontribusi besar terhadap jumlah nelayan perikanan tangkap di Jawa Timur. Dengan garis pantai 47 km, Lamongan menjadi wilayah strategis untuk penelitian perikanan tangkap karena produksi hasil tangkapnya tinggi, mencapai 80.170,34 ton pada tahun 2022 dengan nilai produksi Rp 1,39 triliun.

Tabel 1. 1
Produksi Perikanan Sektor Perairan Laut Menurut Pangkalan Pendaratan

**Ikan, Nilai Produksi, dan Armada Perahu/Kapal di Kabupaten Lamongan
Tahun 2022**

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (x Rp.1000)	Kapal Motor			Jumlah
			Besar	Sedang	Kecil	
1. Lohgung	3.411,48	51.038.825,55	20	-	280	300
2. Labuhan	7.397,10	100.751.421,37	23	-	387	410
3. Brondong/Blimbing	58.798,14	1.118.418.015,03	381	382	214	977
4. Kranji	5.327,72	59.186.906,37	58	45	1.004	1.107
5. Weru	5.235,90	65.016364,69	22	34	573	629
Jumlah	80.170,34	1.394.411.533,01	504	461	2.458	3.423

Sumber: Profil Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan 2022

Usaha penangkapan ikan laut terpusat di perairan Laut Jawa pada wilayah kecamatan Brondong dan Paciran yang memiliki 5 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sekaligus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu mulai arah barat ke timur Lohgung, Labuhan, Brondong, Kranji, dan Weru yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Tingginya produksi perikanan laut, aksesibilitas ke pasar perikanan, serta peran pentingnya dalam perekonomian pesisir menjadikan Lamongan sebagai lokasi yang relevan untuk kajian lebih lanjut.

Selain tingginya produksi perikanan, sistem sosial dan ekonomi nelayan di Lamongan juga menarik untuk diteliti, terutama dalam hal mekanisme bagi hasil yang dikenal dengan istilah “andum”. Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa masyarakat nelayan di Kabupaten Lamongan

menggantungkan hidup pada aktivitas melaut yang disebut dengan “miyang”. Dalam kegiatan miyang ini, hasil tangkapan kemudian dibagi menggunakan sistem bagi hasil antara juragan sebagai pemilik kapal dan belah sebagai anak buah kapal (ABK) yang terlibat dalam proses penangkapan kapal.

Kabupaten Lamongan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sektor perikanan tangkap yang sangat berkembang dibuktikan dengan produksi perikanan kabupaten lamongan pada tabel 1.2. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perikanan bagi ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, sistem bagi hasil yang masih dilakukan secara tradisional menunjukkan perlunya inovasi dalam pencatatan keuangan. Meskipun sistem andum telah lama diterapkan, praktik ini masih mengandalkan kepercayaan lisan tanpa adanya dokumentasi tertulis yang jelas. Situasi ini tidak hanya menimbulkan potensi ketidakjelasan dalam pembagian hasil, tetapi juga meningkatkan risiko kondlik antara juragan dan belah. Menurut keterangan dari Ibu Sumarliah selaku juragan, sering kali terjadi konflik antara juragan dan belah dikarenakan ketidakjelasan sistem pencatatan yang menyebabkan beberapa pihak, khususnya belah, sering kali merasa dirugikan karena pembagian hasil didasarkan hanya pada ingatan atau kepercayaan. Selain itu, biaya operasional yang ditanggung oleh juragan, seperti bahan bakar dan perawatan kapal, sering kali tidak terdokumentasikan secara transparan, sehingga memicu ketidakpercayaan dari belah terhadap porsi andum yang diterimanya. Sistem bagi hasil yang tidak terdokumentasikan dengan baik menyebabkan sulitnya nelayan pekerja menuntut hak mereka, sehingga hubungan kerja cenderung tidak stabil.

Fenomena di atas menunjukkan urgensi penerapan akuntansi sederhana dalam sistem bagi hasil nelayan untuk menghindari konflik dan meningkatkan

keadilan. Dokumentasi yang jelas dan transparan bukan hanya membantu menyamakan pemahaman antara juragan dan belah, tetapi juga memperkuat kepercayaan dalam hubungan kerja. Menurut (Alkamalat et al., 2024), akuntansi sederhana merupakan sistem pencatatan keuangan yang memudahkan individu atau usaha kecil dalam mencatat transaksi keuangan secara sederhana dan mudah dipahami. Akuntansi sederhana memiliki peran penting dalam sektor perikanan tradisional, terutama bagi nelayan yang tidak memiliki latar belakang akuntansi formal. Akuntansi ini mengacu pada pencatatan dasar yang mudah dipahami dan diterapkan, seperti pencatatan jumlah tangkapan harian, hasil penjualan, biaya operasional (misalnya bahan bakar, es, dan perawatan kapal), serta pembagian hasil bersih setelah dikurangi biaya.

Penerapan akuntansi sederhana yang sistematis memungkinkan semua pihak memahami dengan jelas bagaimana keuntungan didistribusikan, serta biaya yang ditanggung selama operasi. Akuntansi sederhana dalam sistem bagi hasil miyang memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil yang memungkinkan pencatatan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat, terutama dalam sektor perikanan yang umumnya masih menerapkan sistem pencatatan secara tradisional. Sebagai bentuk dukungan terhadap pencatatan keuangan bagi usaha kecil, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) telah diterbitkan untuk memberikan pedoman pencatatan yang lebih sederhana. Selain itu, regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah turut mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil, termasuk nelayan, dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Selain sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, akuntansi sederhana juga membantu nelayan dalam memahami pola pemasukan dan pengeluaran mereka. Dengan mengetahui biaya dan pendapatan secara terperinci, nelayan dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik, seperti menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli peralatan baru atau mengatur modal kerja mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan praktis dalam menyediakan solusi pencatatan keuangan sederhana sesuai dengan kondisi nelayan tradisional.

Dalam konteks akuntansi sederhana, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek transparansi dan keadilan dalam sistem pencatatan keuangan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hapsari et al. (2017); Husainah et al. (2021); Mulyani et al. (2022); Widhiastuti et al. (2019) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM cenderung kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan sehingga dilakukan pelatihan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi sederhana pada sektor UMKM. Melalui pelatihan dengan merancang format pembukuan sederhana yang mudah dipahami dan berbagai pendekatan dilakukan. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM mencatat aktivitas keuangan mereka, yang diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha kedepannya.

Sari dan Mudzakir (2023) masih dengan topik dan objek yang serupa pada sektor UMKM di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku UMKM belum menerapkan pencatatan yang sistematis, sering mencampur uang usaha dengan uang pribadi, dan menganggap pembukuan tidak terlalu penting. Hasil dari penelitian tersebut membantu pelaku

UMKM menyusun laporan keuangan dengan lebih rapih dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Tidak hanya dalam sektor UMKM, tantangan serupa dalam pencatatan keuangan juga ditemukan dalam sektor perikanan, sebagaimana diteliti oleh Moeljono (2023) dengan topik akuntansi sederhana pada objek yang berbeda yaitu nelayan budidaya rumput laut Kelurahan Mangkang Kota Semarang. Hasil penelitian menemukan permasalahan bahwa sebagian besar nelayan di daerah tersebut belum memiliki kemampuan mencatat keuangan sederhana, sehingga diberikan pelatihan tentang akuntansi sederhana yang diharapkan agar nelayan mampu menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat catatan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman akuntansi sederhana sering menjadi kendala bagi UMKM dalam mengelola keuangan. Tantangan serupa juga ditemukan dalam sistem pencatatan bagi hasil nelayan. Pratama dan Tumirin (2024) pada penelitiannya mengungkap praktik nelayan di Desa Campurejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan adalah bagi hasil mudharabah dengan presentase pembagian nisbah bagi hasil sebesar 50% banding 50% dan 60% banding 40% yang sudah sesuai dengan teori syariah. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah ketiadaan pencatatan tertulis, dimana semua kesepakatan dilakukan secara verbal dan hanya mengandalkan kepercayaan sehingga berisiko menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian hasil.

Selain aspek pencatatan, penelitian lain juga menyoroiti permasalahan transparansi dan keadilan dalam sistem bagi hasil di sektor perikanan. Penelitian

Alimuddin (2018) mengevaluasi keadilan dan transparansi dalam sistem bagi hasil usaha perikanan tangkap pada komunitas Muslim di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa nilai keadilan, kejujuran dan keseimbangan seringkali diabaikan oleh pemimpin darat dalam pelaporan pendapatan. Ketidadaan pencatatan hasil penjualan dan transparansi harga menciptakan ketidakadilan pembagian pendapatan. Oleh karena itu, pencatatan sederhana diperlukan untuk meningkatkan transparansi, memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak, serta memperkuat kepercayaan dalam kerja sama bagi hasil.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan dalam sistem bagi hasil nelayan sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi dan pencatatan yang sistematis. Hal ini juga terlihat dalam penelitian Syahrizal (2019) yang menyoroti ketidakadilan dalam praktik bagi hasil pada komunitas nelayan. Penelitian tersebut menyajikan permasalahan utama terjadinya ketimpangan dalam sistem bagi hasil pada komunitas nelayan “bagan” di Pasia Nan Tigo, Padang. Ketimpangan tersebut menunjukkan bagaimana pembagian hasil yang tidak selalu adil tetap bertahan karena keterbatasan pilihan ekonomi awak kapal. Hal ini menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem bagi hasil agar setiap pihak mendapatkan keadilan sesuai kontribusinya. Namun, penelitian tersebut masih kurang dalam menawarkan solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian saya menjadi relevan karena akuntansi sederhana dapat menjadi alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem bagi hasil nelayan.

Pentingnya pencatatan dalam sistem bagi hasil juga terlihat dalam penelitian di sektor pertanian, seperti yang dilakukan oleh Susanti et al. (2023). Penelitian tersebut membahas tentang analisis sistem bagi hasil pertanian akad

muzara'ah dan menghasilkan format akuntansi akad muzara'ah di Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Pada penelitian tersebut juga ditemukan bahwa sistem bagi hasil muzara'ah di sektor pertanian Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang dilakukan secara turun-temurun dilakukan tanpa menggunakan pencatatan yang jelas, sehingga peneliti merekomendasikan format akuntansi sederhana untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil dimana hal tersebut relevan dengan tujuan penelitian saya.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dilihat bahwa akuntansi sederhana banyak diterapkan dalam sektor UMKM, sedangkan dalam sektor perikanan, perhatian lebih sering diberikan pada aspek sistem bagi hasil tanpa menyoroti pentingnya pencatatan keuangan. Penelitian yang membahas bagi hasil dalam sektor perikanan umumnya lebih berfokus pada aspek hukum, ekonomi, atau keadilan distribusi, tetapi masih minim kajian yang secara spesifik mengembangkan format pencatatan akuntansi sederhana untuk sistem tersebut. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut sehingga menjadikan penelitian ini penting karena berbeda dari penelitian sebelumnya. Meskipun penelitian tentang akuntansi sederhana dan sistem bagi hasil cukup beragam dalam berbagai sektor, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengeksplor format pencatatan akuntansi sederhana dalam sistem bagi hasil pada sektor perikanan. Pencatatan akuntansi sederhana ini memungkinkan para pekerja pada sektor perikanan, khususnya nelayan, untuk memantau keuntungan penjualan dan biaya dengan lebih mudah, yang sangat penting dalam konteks pembagian hasil. Melalui pencatatan akuntansi sederhana pembagian hasil dapat dilakukan secara lebih jelas dan transparan, sehingga masing-masing pihak mendapatkan pemahaman yang sama dan adil atas

pendapatan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor format pencatatan akuntansi sederhana dalam sistem bagi hasil “miyang”, serta dampaknya terhadap transparansi dan keadilan dalam hubungan juragan dan belah yang disusun dengan judul **“AKUNTANSI SEDERHANA DALAM BAGI HASIL “MIYANG” ANTARA JURAGAN DAN BELAH”**.

Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan format akuntansi sederhana dalam sistem bagi hasil pada sektor perikanan. Untuk penelitian mendatang, disarankan agar membahas hasil penerapan format akuntansi sederhana ini di lapangan untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat meninjau tantangan atau hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi format pencatatan ini serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha nelayan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini:

1. Bagaimana praktik akuntansi yang ada pada nelayan dilihat dari perspektif juragan?
2. Bagaimana format dari akuntansi sederhana yang tepat untuk diterapkan dalam sistem bagi hasil antara juragan dan belah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, berikut adalah tujuan penelitian yang ditetapkan:

1. Mengeksplor praktik akuntansi yang ada pada nelayan dari perspektif juragan.
2. Membuat format akuntansi sederhana yang tepat untuk diterapkan dalam sistem bagi hasil antara juragan dan belah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi literature akuntansi, khususnya dalam konteks akuntansi syariah dari sisi perikanan. Dengan adanya format pencatatan ini, penelitian selanjutnya dapat membahas penerapan format akuntansi sederhana ini dalam bagi hasil akad mudharabah pada sektor perikanan. Tidak hanya bermanfaat untuk juragan dan belah, tetapi juga memberikan rujukan untuk studi lebih lanjut mengenai akuntansi dalam sektor syariah lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Juragan

Dengan menerapkan format akuntansi sederhana yang tepat, juragan dapat dapat lebih mudah memantau pendapatan dan pengeluaran mereka. Hal ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait investasi dan pengelolaan sumber daya. Penerapan sistem akuntansi yang jelas akan mengurangi potensi konflik dengan belah terkait pembagian hasil, menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

b. Bagi Belah

Dengan adanya sistem pencatatan yang transparan, belah akan lebih memahami berapa banyak pendapatan yang mereka peroleh dari hasil tangkapan,

sehingga mereka dapat merencanakan keuangan pribadi dengan lebih baik. Pengetahuan akuntansi yang lebih baik akan memberikan belah posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi dengan juragan mengenai pembagian hasil, meningkatkan keadilan dalam hubungan kerja.